

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas, Negara Hukum*. Jakarta, Erlangga Press. 1980.

Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Andiko. *Untuk apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia, dalam Upaya tiada Henti Mempromosikan Pluralisme dalam Hukum Agraria di Indonesia*. Edisi I. Cetakan 1. Jakarta: Episterna Institut HuMa Forest People programme. 2001.

Arifin, Firmansyah. et.al. *Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2018: A Baseline Research*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable. 2019.

Arto, A. Mukti. "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pengubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak dengan Ayah Biologisnya". dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*. Jakarta: Ditjen Badilag. 2012

Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, Makassar: Social Politic Genius (SIGn). 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.

- , *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- , *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2007.
- , *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co. 1997.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Atmoredjo, Sudjito. *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Yogyakarta: Lingkar Media .2018.
- Awang, Afri (ed). *Inkonsistensi Undang-Undang Kehutanan*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika. 1999.

- Basic Law 1949*. Diterjemahkan oleh Professor Christian Tomuschat and Professor David P. Currie, Revisi Terjemahan oleh: Professor Christian Tomuschat and Professor Donald P. Kommers, 2010.
- Cayaray, Sarliaji. *Model Layanan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2014.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sangir Multi usaha. 2022.
- Currie, David P. *The Constitution of the Federal Republic of Germany*, The University of Chicago Press, Chicago and London. 1994
- Endah, Anggraeni. *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia*. Saraswati Nitisara. Semarang. 2017
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press. 2016.
- Fatmawati. *Hak Menguji (toetsingrecht) yang dimiliki dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005.
- Fauziyah R, Safrina. Pengawasan atas Implementasi Putusan MK Demi Tercapainya Kepastian Hukum di Indonesia, dalam Dri Utari Cristina dan Ismail hasani (ed), Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. 2013.
- Friedmann, Wolfgang. *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy*. London: Steven and Son, 1971.

- Anja, Fohr Seibert. *Judicial Independence in Transition*. Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg - Karlsruhe. 2013.
- Grix, Jonathan Paul Cooke dan Lothar Funk (editor), *Ten Years of German Reunification*, University of Birmingham Press, Birmingham, 2002.
- Gunlicks, Arthur. *The Lander and German Federalism*, Manchester University Press, Manchester and New York. 2003.
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UU*. Jakarta: KPG. 2013.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*. Bandung: Alumni. 1994.
- Hamilton, Alexander. et. al. (Terence Ball, ed.). *The Federalist with Letters of Brutus*. Cambridge: Cambridge University Press. 2003.
- Hasani, Ismail. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. 2013.
- HS, Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW]*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Gatra Pustaka. 2010.
- Kasim, Ifdhal. et.al. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2001.

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New Brunswick (USA) and London (UK), Transaction Publisher. 2006.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 'Mahkamah Konstitusi Menegakan Konstitusionalisme Dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014. Jakarta: *Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*. 2014.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2007.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2017.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press. 2014.

- Laksono, Fajar. et.al. *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/ Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013
- Leonhard, Jorn dan Lothar Funk (editor). *Ten Years of Germani Unification*, Birmingham: University of Birmingham Press. 2002.
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Issue*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Mahkamah Konstitusi, “Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2020, Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi”, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Januari 2021.
- , Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2004.
- , *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris Se-Malang Raya)*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2018.

- , *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- , *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012 Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013.
- , *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020*, Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2020.
- , *Mahkamah Konstitusi Menegakan Konstitusionalisme Dalam Dinamika Politik*, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2014.
- Mayang, Adam Mulya Bunga dan Adelline Syahda. *Seri 3 Konstitusionalitas Pengaturan Sumber Daya Alam Kepatuhan Penyelenggara Negara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kehutanan, Perkebunan, Dan Pertambangan (2003 – 2016)*. Jakarta: Yayasan Konstitusi Demokrasi Inisiatif. 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1993.
- , *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2015.

- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Palguna, I Gede Dewa. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Parlindungan, A.P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono R. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Penerbitan Sumur Bandung. 1974.
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, “Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara”. Hasil Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta. 2009.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Rosyadi, Imran. “Implikasi Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974”. dalam *Membangun Peradilan Agama yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*. Jakarta: Ditjen Badilag. 2012.
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara.*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

- Safa'at, M. Ali. et.al. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2019.
- Samsul, Inosentius et.al. "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi". Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI. 2009.
- Sardini, Nur Hidayat dan Gunawan Suswanto (editor). *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Menurut Para Sahabat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016.
- Saleh, Ismail. *Demokrasi Konstitusi dan Hukum*, Jakarta: Depkeh RI. 1998.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, Citra Aditya, 2005
- Setijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2009.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga. Jakarta: UI Pers. 2015.
- , & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.

- Sofyan, Sri Soedewi Masjhoen. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM. 1975.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2009.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. 2005.
- Suparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Supriyadi, Harri. Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pontianak. Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2008.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Kesebelas. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Syahrani, H. Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni. 2004.
- Tanya, Bernard L. et.al. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Thaib, Dahlan. Et.al. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Vollmar, H.F.A. diterjemahkan oleh I.S. Adimiwarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali, 1984.

Wignjosuebrot, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya..* Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa). 2003.

Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern (Modern Constitution)*. Bandung: Nusa Media. 2015.

Yakin, Arief Ainul. *Constitutional Question: Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

----, *Mengawal Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press. 2016.

Jurnal:

Abadi, Suwarno. “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 3. 2015.

Asshiddiqie, Jimly. “Upaya Perancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4, No.2 Juli 2015.

- Asy'ari, Syukri. et.al. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)". *Jurnal Konstitusi*. Volume 10 Nomor 4 Desember 2013.
- Awaludin, Pramadya Khairul "Akses Individual ke Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengujian Konstitusional di Jerman dan Indonesia (Suatu Kajian Dalam Perspektif Perbandingan)". Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2013.
- Aziz, Machmud. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia". *Jurnal Konstitusi*: Volume 7. Nomor 5. 2010. 113-150.
- Benuff, Kornelius. & Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Borowski, Martin. "The Beginnings of Germany's Federal Constitutional Court". *Journal Ratio Juris*, Vol. 16, No. 2, Juni 2003.
- Bugaric, Bojan. "Courts as Policy-Makers Lessons from Transition". *Harvard International Law Journals*, 2001, Vol. 42 Number 1, Winter 2001.
- Dinopati, Eva. "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris". *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 2, Januari 2017.

- Garlicki, Lech. "Constitutional Courts Versus Supreme Courts". *Oxford University Press and New York University School of Law*. I.con, No 1 Vol 5. 2007.
- Ghofur, Jamaludin. "Membangun Sinergitas Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Legislatif dan Eksekutif (Upaya Memaksimalkan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi)". *Jurnal Konstitusi*. Volume II. November 2009.
- Hadiati, Mia Hadiati. et.al, "Efektifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humanior, dan Seni*, ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) Vol. 5 No. 1. April 2021.
- Hailbronner, Michaela. "Rethinking the Rise of the German Constitutional Court: From Anti-Nazism to Value Formalism". *International Journal of Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press Vol. 12, No. 3, Juli, 2014.
- Hasibuan, H.A. Lawali & Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Pencari Keadilan Hakiki". *Jurnal Legisla*. Vol.14 No. 2, Juli 2023.
- Hastuti, Proborini. "Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar". *Supremasi Hukum*, Vol. 7 No.1 Juni 2018.
- Isharyanto. "Keterbatasan Pengadilan untuk Melakukan Pengujian Konstitusional (*Constitutional Review*): Pengalaman Jepang". *Pranata Hukum*, Vol. 10. No. 2. 2015.

- Isra, Saldi. Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Peradilan*. Vol.04. No. 1 2015.
- Jafar, Kamarudin. “Menguji Positive Legislature sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. *Holrev*, Volume 1 Issue 2. September 2017.
- Kapitan, Rian Van Frits. “Kekuatan Mengikat Putusan *Constitutional Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung”. *MMH* Jilid 44 No. 4. Oktober 2015.
- Kusumadewi, Yessy. “Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 1 Juli 2018.
- Limbach, Jutta. “The Concept of the Supremacy of the Constitution”. *The Modern Law Review*. Vol.64, No. 1, Januari 2001.
- Lumbuun, Topane Gayus. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung oleh DPR’. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 3. September 2009.
- Mahfud MD, Moh. “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Hukum*. Nomor 4. Volume 16, Oktober 2009.
- Mardiana, Lidya dkk, Eksistensi Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/ 2010 dan Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 Setelah Adanya Undang-Undang Tentang Perkawinan Terbaru, *Notaire* Vol 3 No.1 2020.
- Marzuki, Laica 2007. “Membangun Undang-Undang Yang Ideal”. *Jurnal Legislasi*, Vol 4 No 2 Juni 2007.

- Maulana, Agung Putra dan Muhamad Azhar, “Penafsiran Cidera Janji oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya”. *Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020)*.
- Mohamad, Fais Pan. “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol.13 No.2 Juni 2016.
- , “Teori Keadilan John Rawls”. *Jurnal Hukum* Volume 6, Nomor 1, April 2009.
- Muhlizi, Arfan Faiz. “Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 8. No. 2. 2015.
- Mulyani, Lilis. “Pengelolaan Sumber Daya Alam di Mata Mahkamah Konstitusi: Analitis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sumber Daya Alam”. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. Volume 10 No. 2 Tahun 2008.
- Mulyata, Jaka. “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015. https://eprints.uns.ac.id/23363/1/S311308006_pendahuluan.pdf, diakses 24 Januari 2022.
- Palguna, IDG. “Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 17 No.1 2010. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art1>

- Putra, I Gusti Putu Aditya Pramana et. al. "Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Studi Kasus di PT BPR Prima Nadi). *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023. <http://risalah.unram.ac.id> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram, diakses 20 Mei 2024.
- Putri, Intan Permata & Mohammad Mahrus Ali. Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima. *Jurnal Konstitusi*. Vol 16, Nomor 4, Desember 2019.
- Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13. No. 53. April 2011.
- Rachman, Irfan Nur. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Sumber Daya Air". *Kajian* Vol. 20 No. 2 Juni 2015.
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. No. 3 Vol. 16. Juli 2009.
- Sucahyono. "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Salam*. Vol. 6 No. 4. 2019.
- Subarudi. "Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 11 No. 3. Desember 2014.
- Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1. 2016.

Suprantio, S., “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “Testimonium De Auditu” dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 7(1) April 2014.

Surono, Agus. “Penyelesaian Konflik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan dan Perkebunan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011. Prociding Seminar Nasional Perlindungan Sumber Daya Alam. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. 2017.
<https://repository.uai.ac.id/wp-content/>

Tarigan, Jefri Porkonanta. “Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15 No. 1 Maret 2018.

Utomo, Nurrahman Aji. “Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 4 Desember 2015.

Wahyudi, Rizki M. Gaussyah., dan Darmawan. “Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Mercatoria*. 11 (2) 2018.

Zeidler, Wolfgang. “The Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany: Decisions on the Constitutionality of Legal Norms.” *Notre Dame Law Review*. Vol. 62, Issue 4. Indiana: University of Notre Dame. 1987.

Internet:

Alwesius. "Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"

<http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>, diakses 12 Desember 2019.

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". http://www.jimly.com/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. diakses 11 Januari 2022.

Anonim. "Austria 1920 (reinst. 1945, rev. 2013). <https://www.constituteproject.org/constitution/> diakses 2 Desember 2024.

Anonim. "Gagasan Pembentukan P3RS Pasca Judicial review", <https://www.rei.or.id/newrei/berita-pembentukan-p3srs-pasca-judicial-review.html>, diakses 18 Juli 2020.

Anonim. "Konflik Apartemen: Putusan MK Masih Membingungkan", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160513/49/547027/konflik-apartemen-putusan-mk-masih-membingungkan>, diakses 18 Juli 2020.

Anonim. "Regulasi Terbaru Tentang Rumah Susun". <https://buletinhukum.com/implikasi-positif-dari-2-regulasi-terbaru-tentang-rumah-susun/> diakses 18 Januari 2021.

Cardima, Aska dan Hadyan Iman Prasetya. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>. 22 Januari 2020.

Duhaime.org. "Erga Omnes Definition". <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/E/ErgaOmnes.aspx>. 1 Oktober 2020.

- Fadjar, Mukti “MK Sebagai Negative Legislator” dalam <https://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-MuktiFadjar-MK-Sebagai-Negative-Legislator-821-id.pdf>. 2 Agustus 2017.
- Isna Wahyudi. Muhammad. “Meramal Nasib Status Anak Machica”, www.badilag.net. 15 Oktober 2014.
- Isra, Saldi. “Negative Legislator”. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html>. 2 Agustus 2017.
- Mavcic, Arne. *Constitutional Review in the Federal States*, <http://www.concourts.net/lecture/lecture4.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.
- Rahim, Abdurrahman. “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama)”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses 5 September 2020.
- Sutisna, Aji Sahdi. “Pandangan Pandangan Perhutani atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011”. <https://www.slideshare.net/ajipanjalu/perhutani-mk-35>. diakses 16 Agustus 2021.
- Yasin, Muhammad. ‘Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat’ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat/>. 2019. 2 April 2020.

Makalah:

- Ali, M. Hatta. “Sambutan Ketua Mahkamah Agung” dalam Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”.

(Jakarta: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 13 November 20014).

Asshiddiqie, Jimly. “Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi”. Makalah. Disampaikan dalam The Three “E” Lecture Series, @america. (Jakarta: 18 Juni 2012) [http://www.jimly.com/makalah/namafile/111/ CONSTITUTIONAL_REVIEW_america.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/111/CONSTITUTIONAL_REVIEW_america.pdf). 11 Januari 2020.

Baer, Susanne. “Questionnaire Reply by the Federal Constitutional Court of Germany” Constitutional Justice and Social Integration. 3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice ‘Constitutional Justice and Social Integration’. Seoul 28 September - 1 October 2014. https://www.venice.coe.int/WCCJ/Seoul/docs/Germany_CC_reply_questionnaire_3WCCJ-E.pdf, diakses 20 Juni 2024.

Djamin, Rafendi. “Penguatan Status Legal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Nasional: Potensi dan Tantangan”. Makalah. Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi. Sosial dan Budaya di Indonesia. (Yogyakarta 16 – 18 April 2007).

Anonim. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan (2003-2016)”. Hasil *Forum Group Discussion*. disampaikan dalam yang diselenggarakan pada

tanggal (Jakarta: Kode Inisiatif bekerjasama dengan The Asia Foundation.17 Oktober 2016).

Kūtris, Gunārs. “Authority Of The Constitutional Court As The Precondition Of Execution Of The Decisions”. Makalah. Disampaikan dalam Conference on On The Occasion Of The 10th Anniversary Of The Constitutional Court Of Azerbaijan tentang Execution Of The Decisions Of Constitutional Courts: A Cornerstone Of The Process Of Implementation Of Constitutional Justice. (Baku, Azerbaijan 14-15 July 2008).

Nurbaningsih, Enny. “Desain Konstitusional Pembangunan Hukum Daerah”. Makalah. Disampaikan dalam Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional: Pembinaan Hukum di Daerah Tahun 2022. (Surabaya: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN. 29 Juli 2022). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18392>. diakses 15 Juni 2024.

Purba, Rehngena. “Hukum acara Pengukuhan Anak Luar Kawin Sebelum dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Makalah. Disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Ilmiah tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak Luar Kawin terhadap Hukum Perdata Indonesia: Tinjauan Akademis dan Praktik. (Jakarta: SS.co. Advocates. 29 Mei 2012).

Zaid, Muhammad, Makalah. Disampaikan dalam FGD mengenai Pelaksanaan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI. 13 Agustus 2014).